

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH JAWA BARAT MELALUI ANALISIS RASIO ANGGARAN DAN PENGELUARAN MENCIPTAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (TAHUN ANGGARAN 2022–2024)

Ai Cahyati¹, Choirul Hana²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kahuripan Kediri ^{1,2}

aicahyati41@gmail.com ¹, choirulhana@kahuripan.ac.id ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat dengan menggunakan analisis rasio anggaran dan pengeluaran (Budget Performance Ratio). Dalam pengelolaan keuangan publik, penting untuk memahami seberapa efektif penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yang menganalisis data sekunder dari laporan keuangan tiga tahun terakhir. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan dinas tergolong sangat baik, dengan realisasi pendapatan yang secara konsisten melebihi target, terutama dari Pendapatan Asli Daerah seperti sewa gedung. Rasio efisiensi juga menunjukkan nilai yang tinggi dan stabil di sekitar 97%, yang mencerminkan pengelolaan pengeluaran yang hati-hati dan sebanding dengan penerimaan. Di sisi lain, rasio kemandirian finansial mencapai 100% setiap tahunnya, menunjukkan bahwa semua pendapatan bersumber dari PAD tanpa tergantung pada dana transfer dari pusat, yang menguatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan bendahara yang menekankan pentingnya optimalisasi sumber PAD dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini merekomendasikan diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan sistem informasi keuangan yang transparan dan kerja sama lintas sektor untuk menjaga kesinambungan dan memperkuat pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. Studi ini memberikan wawasan menyeluruh tentang kinerja anggaran dan pengeluaran yang berdampak pada peningkatan layanan untuk masyarakat.

Kata kunci : *Analisis Rasio Anggaran, Budget Performance Ratio, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kinerja Keuangan, Pengelolaan Keuangan Publik.*

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan menjadi tolok ukur utama dalam menilai kemampuan instansi publik dalam menjalankan fungsinya. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat (Dispusipda) memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat dan melestarikan arsip daerah. Maka dalam hal ini, pengelolaan anggaran yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, mengingat keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi oleh lembaga publik. (Marinus Ronal & Albert Agus Massua, 2023). Dalam rangka mendukung tugas ini, ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang optimal sangat krusial. Periode 2022–2024 menunjukkan variasi antara target dan realisasi anggaran yang mendorong perlunya evaluasi yang sistematis.

Penelitian ini berfokus pada penilaian kinerja keuangan Dispusipda Jawa Barat melalui analisis rasio: efektivitas (realisasi terhadap target pendapatan), efisiensi (realisasi pengeluaran terhadap realisasi penerimaan), dan kemandirian (kontribusi PAD terhadap total pendapatan). Tujuan penelitian adalah (1) mengukur kinerja keuangan; (2) mengidentifikasi tren; dan (3) merekomendasikan perbaikan untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah indikator kemampuan suatu lembaga publik dalam mengelola dana secara baik, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab untuk memenuhi sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018), kinerja keuangan dalam sektor publik menggambarkan sejauh mana aktivitas keuangan dilakukan menggunakan prinsip Nilai untuk Uang (Value for Money atau VfM) yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: pertama, Ekonomi, yang mengukur sejauh mana pemanfaatan sumber daya dilakukan secara hemat. Kedua, Efisiensi, yang menilai hubungan terbaik antara input dan output. Ketiga, Efektivitas, yang mengukur tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Dalam aspek keuangan daerah, indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah Rasio Kinerja Anggaran (Budget Performance Ratio atau BPR), yang membandingkan realisasi dengan rencana anggaran. Rasio tersebut mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target keuangan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik. Pemerintah daerah dengan BPR yang tinggi menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik, efektif, dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan urusan pemerintahan terkait dengan perpustakaan dan kearsipan. Tugas ini mencakup pengelolaan perpustakaan deposit, pengembangan dan promosi budaya membaca, serta pengelolaan arsip baik yang bersifat dinamis maupun statis. Dispusipda juga menjalankan fungsi dekonsentrasi serta memberikan bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terlibat dalam penyusunan kebijakan teknis, administrasi dinas, serta pelaporan kinerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU) yang dievaluasi setiap tahun berdasarkan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal kuantitatif, hasil yang dicapai oleh Dispusipda menunjukkan kinerja yang baik terhadap target program yang ditetapkan, namun secara kualitatif masih terdapat tantangan, terutama dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (pustakawan dan arsiparis) serta rendahnya Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat (IPLM) di Jawa Barat. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas SDM dan budaya literasi menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kinerja lembaga. Dalam Rencana Kerja (Renja) Dispusipda tahun 2024, penyesuaian anggaran dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan di Jawa Barat dan menjamin efektivitas pelaksanaan program. Proyeksi kebutuhan dana sebesar Rp 55,57 miliar ditujukan untuk mendukung 11 prioritas pembangunan daerah. Evaluasi terhadap kinerja keuangan menjadi penting untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran serta memastikan bahwa alokasi dana memberikan hasil yang optimal. Pendekatan Budget Performance Ratio (BPR) diterapkan untuk menilai sejauh mana realisasi anggaran mencerminkan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan. Melalui analisis ini, Dispusipda mampu: (1) Menilai efisiensi penggunaan anggaran, (2) Meningkatkan akuntabilitas dalam keuangan, (3) Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan hasil, serta (4) Mendukung perencanaan strategis yang berbasis data.

Dengan menerapkan BPR, Dispusipda Jawa Barat dapat menjamin bahwa setiap alokasi anggaran secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, efektivitas pelayanan publik, dan pencapaian visi pembangunan daerah yang lebih baik. Budget Performance Ratio alat analisis yang dipakai dalam penilaian keuangan publik untuk mengetahui sejauh mana

pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Menurut Saragih et al. (2021), BPR menilai kecocokan antara rencana keuangan dan realisasi, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas serta efisiensi kinerja anggaran. BPR umumnya terdiri dari tiga rasio utama: pertama, Rasio Efektivitas, menggambarkan sejauh mana pencapaian pendapatan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kedua, Rasio Efisiensi, menilai kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan dana secara efektif demi mendapatkan hasil maksimal. Ketiga, Rasio Kemandirian Keuangan, menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa tergantung pada dana dari pusat. Implementasi BPR yang baik tidak hanya membantu dalam menilai efektivitas dan efisiensi keuangan, tetapi juga menjadi landasan untuk pengambilan keputusan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting dalam sistem Good Governance yang berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan dana publik. Dalam Penelitian Ifada, B. I., & Ardini, L. (2023), Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan kepada pihak yang telah memberikan amanah, sehingga menjadi kewajiban serta tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Adisasmita (2011) menyatakan bahwa transparansi adalah sikap terbuka dari pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Sementara itu, Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh entitas publik untuk menjelaskan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memberikan kepercayaan, melalui mekanisme laporan yang jelas dan terukur. Kedua prinsip tersebut saling mendukung. Transparansi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Penelitian oleh Berliana Rahmiyati (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan dilakukan melalui penyajian laporan realisasi anggaran (LRA) yang terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh masyarakat, serta pelaporan kegiatan yang menampilkan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran secara efisien dan tepat sasaran.

Teori Manajemen Keuangan Publik menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang berfokus pada hasil dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal. Mu'alimah dan Eryina (2023) menyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar anggaran yang dibuat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Dalam teori ini, efektivitas diartikan sebagai seberapa baik alokasi anggaran mampu memenuhi tujuan yang ditetapkan, sementara efisiensi berfokus pada pengurangan biaya tanpa menurunkan kualitas hasil. Oleh karena itu, teori ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap uang yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi publik. Dalam manajemen keuangan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memainkan peran penting dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Tujuan dari audit yang dilakukan oleh BPK adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keterbukaan. Hasil audit yang diberikan oleh BPK dapat menjadi bahan penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem keuangan pemerintah daerah serta mendorong peningkatan kinerja lembaga public.

Dalam konteks Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, audit yang dilaksanakan oleh BPK berfungsi untuk memastikan bahwa implementasi program dan penggunaan dana mengikuti prinsip Rasio Kinerja Anggaran dan tidak menyimpang dari peraturan anggaran yang telah ditentukan.

Relevansi Budget Performance Ratio terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Analisis Budget Performance Ratio (BPR) tidak hanya menggambarkan pencapaian finansial, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang krusial untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di bidang publik. Dengan menilai efektivitas, efisiensi, dan kemandirian finansial, BPR dapat menunjukkan sejauh mana lembaga publik menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat, penerapan analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kecocokan antara anggaran dan realisasinya, menilai seberapa efisien penggunaan dana, serta memastikan bahwa semua pengeluaran publik ditujukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, BPR berfungsi sebagai indikator penting yang menghubungkan kinerja keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Judijanto, L., & Afandy, C. (2024), dalam bukunya yang berjudul *Pengukuran kinerja sektor publik* bahwa, analisis anggaran adalah proses penting dalam pengelolaan keuangan di sektor publik. Tujuan dari proses ini adalah untuk membandingkan rencana anggaran dengan kenyataannya guna menilai apakah pencapaian finansial tersebut efektif dan efisien. Dengan melakukan analisis anggaran, lembaga publik bisa menemukan perbedaan dan mengambil tindakan yang tepat agar kondisi keuangan tetap dalam kinerja yang baik (Purba dan Silalahi, 2021). Analisis rasio kinerja yang melibatkan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan rasio pengeluaran pegawai untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah (Kawatu, 2019; Anwar et al. , 2022). Pendekatan ini menilai kinerja tidak hanya dari sisi kuantitatif tetapi juga kualitatif dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan publik yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis rasio keuangan berfungsi untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara efisien, efektif, dan mandiri (Ambya, 2023; Erlina, 2008). Rasio-rasio ini memberikan informasi kuantitatif mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi indikator utama dalam menilai kinerja keuangan publik. Selain itu, indikator tambahan seperti Rasio Kerasian, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan Rasio Pertumbuhan dipakai untuk menilai keseimbangan antara belanja operasional dan pembangunan, kemampuan membayar utang, serta laju pertumbuhan kinerja keuangan daerah (Tumija dan Sinta, 2022). Penelitian oleh Siswanto dan Maylani (2022) menekankan bahwa laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca adalah alat penting dalam menganalisis kinerja keuangan, karena memberi kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Evaluasi kinerja keuangan di sektor publik memiliki peranan yang sangat krusial untuk menjamin bahwa penggunaan dana publik berlangsung dengan cara yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Menurut Mahmudi (2020), tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan memberikan gambaran kuantitatif tentang efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam konteks Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusipda) Jawa Barat, evaluasi kinerja keuangan tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada bagaimana dana publik dimanfaatkan untuk mendukung program literasi, pengembangan fasilitas, dan pelatihan

sumber daya manusia. Hasil evaluasi pada tahun 2022 mencatat rata-rata capaian sebesar 97,04%, meskipun masih ada beberapa tantangan seperti keterlambatan dalam penyerapan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Evaluasi ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar yang mendasar dalam tata kelola keuangan publik. Transparansi memastikan adanya keterbukaan informasi untuk publik, sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang (Mahmudi, 2020). Dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus, pemerintah daerah dapat mengenali hambatan, memperbaiki kebijakan yang ada, serta memastikan setiap rupiah dari anggaran memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kinerja keuangan daerah yang baik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Menurut Mbipi et al. (2021) dan Lona et al. (2023), manajemen keuangan yang efisien, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dispusipda Jawa Barat. Transparansi memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat informasi anggaran dan mengawasi realisasinya, sedangkan akuntabilitas memastikan semua pengeluaran dapat dijelaskan. Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi unsur penting untuk menjamin bahwa dana publik memberikan hasil optimal untuk program literasi, pengelolaan arsip, serta pengembangan layanan perpustakaan. Penerapan prinsip tata kelola yang baik membantu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan disiplin dalam administrasi keuangan, serta memastikan bahwa laporan yang disampaikan bersifat transparan dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan mendukung tujuan pembangunan di bidang literasi serta arsip daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian: deskriptif kuantitatif. Sumber data utama adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat tahun 2022–2024. Data tambahan diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan bendahara instansi untuk mengklarifikasi item-item pendapatan dan pengeluaran.

Rasio yang dihitung:

1. Rasio Efektivitas = $(\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Target Pendapatan}) \times 100\%$

2. Rasio Efisiensi = $(\text{Realisasi Pengeluaran} / \text{Realisasi Penerimaan}) \times 100\%$

3. Rasio Kemandirian = $(\text{PAD} / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$

Analisis dilakukan per tahun (2022, 2023, 2024) dan dibahas menggunakan pendekatan komparatif antar tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan data LRA dan hasil perhitungan rasio serta interpretasinya.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2022–2024

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	PAD (Rp)
2022	50.000.000	81.466.500	50.920.053.963	52.472.271.185	81.465.500

2023	100.168.000	117.774.000	53.638.015.965	54.798.043.243	117.774.000
2024	100.168.000	113.048.000	50.138.317.598	51.264.790.371	113.048.000

Analisis LRA: Data menunjukkan realisasi pendapatan melebihi target pada semua tahun, sedangkan realisasi pengeluaran dan penerimaan tercatat dalam nilai rupiah yang lebih besar karena melibatkan transaksi operasional instansi. PAD menyumbang penuh terhadap total pendapatan setiap tahun.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio (Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian)

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Kemandirian (%)
2022	162,93	97,04	100
2023	117,58	97,88	100
2024	112,86	97,80	100

Pembahasan:

- Efektivitas pendapatan >100% menunjukkan realisasi pendapatan melebihi target perencanaan, yang positif namun perlu ditelaah penyebab kenaikan (mis. penerimaan sewa).
- Efisiensi sekitar 97% menunjukkan penggunaan anggaran relatif hemat, meski belum mencapai efisiensi sempurna.
- Kemandirian 100% menunjukkan ketergantungan penuh pada PAD; hal baik untuk otonomi namun berisiko jika PAD menurun tanpa adanya sumber alternatif.

LAMPIRAN: PERHITUNGAN MANUAL RASIO

Lampiran ini menyajikan perhitungan rinci dalam bentuk tabel matematis untuk setiap tahun (2022, 2023, 2024). Rumus yang digunakan:

Rasio Efektivitas = $(\text{Realisasi Pendapatan} / \text{Target Pendapatan}) \times 100\%$

Rasio Efisiensi = $(\text{Realisasi Pengeluaran} / \text{Realisasi Penerimaan}) \times 100\%$

Rasio Kemandirian = $(\text{PAD} / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$

Perhitungan 2022

Item	Nilai (Rp)
Target Pendapatan	50.000.000
Realisasi Pendapatan	81.465.500
Realisasi Pengeluaran	50.920.053.963
Realisasi Penerimaan	52.472.271.185

Rasio	Formula	Hasil
Efektivitas (%)	$(81.465.500 / 50.000.000) \times 100\%$	162.93 %
Efisiensi (%)	$(50.920.053.963 / 52.472.271.185) \times 100\%$	97.04 %
Kemandirian (%)	$(81.465.500 / 81.465.500) \times 100\%$	100.00 %

Penjelasan singkat: Efektivitas mengukur pencapaian pendapatan terhadap target; efisiensi mengukur perbandingan pengeluaran terhadap penerimaan; kemandirian mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan.

Perhitungan 2023

Item	Nilai (Rp)
Target Pendapatan	100.168.000
Realisasi Pendapatan	117.774.000
Realisasi Pengeluaran	53.638.015.965
Realisasi Penerimaan	54.798.043.243

Rasio	Formula	Hasil
Efektivitas (%)	$(117.774.000 / 100.168.000) \times 100\%$	117.58 %
Efisiensi (%)	$(53.638.015.965 / 54.798.043.243) \times 100\%$	97.88 %
Kemandirian (%)	$(117.774.000 / 117.774.000) \times 100\%$	100.00 %

Penjelasan singkat: Efektivitas mengukur pencapaian pendapatan terhadap target; efisiensi mengukur perbandingan pengeluaran terhadap penerimaan; kemandirian mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan.

Perhitungan 2024

Item	Nilai (Rp)
Target Pendapatan	100.168.000
Realisasi Pendapatan	113.048.000
Realisasi Pengeluaran	50.138.317.598
Realisasi Penerimaan	51.264.790.371

Rasio	Formula	Hasil
Efektivitas (%)	$(113.048.000 / 100.168.000) \times 100\%$	112.86 %
Efisiensi (%)	$(50.138.317.598 / 51.264.790.371) \times 100\%$	97.80 %
Kemandirian (%)	$(113.048.000 / 113.048.000) \times 100\%$	100.00 %

Penjelasan singkat: Efektivitas mengukur pencapaian pendapatan terhadap target; efisiensi mengukur perbandingan pengeluaran terhadap penerimaan; kemandirian mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Pertama, Kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat (2022–2024) tergolong baik berdasarkan indikator BPR: efektivitas >100%, efisiensi sekitar 97%, dan kemandirian 100%. Kedua, Tren efektivitas menunjukkan penurunan dari 162,93% (2022) menjadi 112,86% (2024) sehingga perlu pemantauan lebih lanjut.

Saran:

Pertama, Diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi risiko ketergantungan PAD terhadap satu atau beberapa pos pendapatan. Kedua, Peningkatan kapasitas SDM akuntansi

dan perbendaharaan untuk memperkuat perencanaan dan pelaporan keuangan. Ketiga, Pengembangan sistem informasi keuangan yang memadai untuk mempercepat realisasi anggaran, memudahkan pemantauan, dan meningkatkan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akyani, R., & Rohayatul, S. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2022 Melalui Pendekatan Value for Money*. Undergraduate Thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Ambya, Prof. Dr., S.E., M.Si. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*. AURA: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2021). *Laporan Kinerja Tahun 2021*. Diakses dari <https://jabar.bpk.go.id/files/2022/04/LAPKIN-JABAR-2021-Final.pdf>
- Bappeda Jawa Barat. (2024, Januari 15). *Literasi: Herman Suryatman – Kampanye Harus Rutin, Masif, Terukur*. Bappeda Jawa Barat. <https://bappeda.jabarprov.go.id/literasiherman-suryatman-kampanye-harus-rutin-masif-terukur/>
- Berliana, R. (2022). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bogor*.
- Dewi, K. D. P., & Lubis, A. W. (2022). *Analisis Laporan Ikhtisar Realisasi Anggaran Untuk Menilai Pencapaian Kinerja Keuangan Pada Kantor Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.15>
- Dhuri Mbipi, S. (2021). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152-158. DOI:10.26905/afr.v3i2.5503.
- Dilliana, Siktania Maria, S.Akun., M.Si., Ak. & Herdi, Henrikus, S.E., M.S.A. (2021). *Manajemen Keuangan Daerah*. EUREKA MEDIA AKSARA, Juli 2022.
- Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat. (2024). *Rencana awal dan rencana kerja 2024 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat*. Diakses dari <https://dispusipda.jabarprov.go.id/download>.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*. Diakses dari <https://dispusipda.jabarprov.go.id/berita/profil/struktur-organisasi>
- Ervina, D. & Mu'alimah, S. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Kabupaten Tuban Di Masa Pandemi Covid-19*. *Journal of Finance and Accounting Studies*, 5(2), 1-9.
- Febrian, G. F., & Figueredo, G. (2024). *KemenkeuGPT: Leveraging a Large Language Model on Indonesia's Government Financial Data and Regulations to Enhance Decision Making*. arXiv. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i2.258>
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Literature Review*. *EL MUHASABA Jurnal Akuntansi (e-Journal)**, 12(2), 157-171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Ifada, B. I., & Ardini, L. (2023). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bojonegoro*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(1)
- International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*. (2022). *Financial Ratio Analysis in Assessing the Financial Performance of Local Governments*.

- Judijanto, L., & Afandy, C. (2024). Pengukuran kinerja sektor publik (hlm. 59-62). PT MAFY Media Literasi Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Value for Money (VfM). Diakses dari https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm?utm_source=chatgpt.com
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2024). Kemenko PMK Dorong Pemprov Jabar Tingkatkan Budaya Literasi. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-pemprov-jabar-tingkatkan-budaya-literasi>
- Kurniawan, H. (2021). Inovasi Kegiatan Literasi FTBM Jawa Barat dan TBM Jatmika Bandung Dalam Menjaga Energi Literasi Masyarakat Jawa Barat Di Masa Pandemi. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/355512648_Inovasi_Kegiatan_Literasi_FTBM_Jawa_Barat_Dan_TBM_Jatmika_Bandung_Dalam_Menjaga_Energi_Literasi_Masyarakat_Jawa_Barat_Di_Masa_Pandemi
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang Tahun 2023. (2023). Diakses dari <https://www.karawangkab.go.id/dokumen/dinas-arsip-dan-perpustakaan>
- Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Diakses dari https://dispusipda.jabarprov.go.id/informasi/laporan_kinerja
- Litauji, N. M. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Kecamatan Kramat. Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Mahmudi. (2020). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)*, 14(1), 11-20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 669-693. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p26>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). 5 Tahun Jabar Juara: Festival Literasi Digital 2023 Tekankan Empat Pilar di Era Serba Cepat. Jabarprov.go.id. <https://jabarprov.go.id/berita/5-tahun-jabar-juara-festival-literasi-digital-2023-tekanan-empat-pilar-di-era-serba-cep-10280>
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2024). Jawa Barat Gelar Festival Literasi: Habis Gelap Terbitlah Terang. Perpustakaan. <https://www.perpusnas.go.id/berita/jawa-barat-gelar-festival-literasi-habis-gelap-terbitlah-terang>
- Ramadhan, F. (2020). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
- Romadhan, S., Siboro, S. F., Kusuma Putri, S. N., & Hia, W. V. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2022. Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global, 1(3). <https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i2.258>
- Romadhon, S., et al. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2022.
- Ronal, M., & Massua, A. A. (2023). Analisis kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten tana toraja. <https://doi.org/10.59024/semnas.v1i2.63>

- Sanger, G. W., Manossoh, H., & Korompis, C. W. M. (2021). *Evaluasi Kinerja Keuangan dengan Metode Value for Money pada Badan Pengelola Keuangan Kota Manado*.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2021). *Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing*.
- Sari, I., et al. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019.
- Siswanto, et al. (2022). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Sumartin, S. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 7(1), 45-53. DOI:10.33395/owner.v7i1.1486.
- Suridiyanti, W. A., Haliah, & Nurleni. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. Volume 17, Nomor 01, Januari 2024
- Tambunan, T. S.. (2023). Implementasi Manajemen Kinerja Pegawai Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. *Jurnal Manajemen dan Kinerja*, 5(2), 123-135. Diakses dari <https://ifrelresearch.org/index.php/jmki-widyakarya/article/view/2248>
- Tumija, T., & Sinta, G. (2022). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9(2), 61-78.
- Wulandari, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection*, 4(2). <https://doi.org/10.37481/sjr.v4i2.303>